

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Baldric Siregar, 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*, Yogyakarta: UPP STIM, YKPN.
- Bohari, 2014. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rudy Badrudi, 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta
- Mustaqiem, 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara (Bahan Ajar Fakultas Hukum Panji Sakti)*
- S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Cikal Sakti
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Edisi Pertama*, Yogyakarta: Andi
- Soni Devan dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana
- Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers
- Yusri Munaf, 2017, *Hukum Adinistrasi Negara Dan Upaya Administrasi Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

JURNAL & SKRIPSI

- Fery Darmansyah Siregar, *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)*, Jurnal Hukum Kemasyarakatan, Al-Hikmah, Vol 1 September 2020
- Kemal Hidjaz, 2010, "Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia," Makassar, Pustaka Refleksi

I Kadek Denny Harta Dwipayana dkk, *Implikasi Dari Sanksi Administratif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Renon Denpasar)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2.

Sri Rahayu, *Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar*, Jurnal Administrasi: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol 5.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 28 tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari luar Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Barat Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

WEBSITE

Bapenda.sumbarprov.go.id

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang (Diakses pada jumat, 05 Agustus 2022, pukul 23.05 WIB)